(KOP SURAT SATKER)

SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR OLEH PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

A.	Data Pribadi						
	Nama Lengkap PPSPM (ses KTP)	uai	:			9	
2.	NIP / NRP		:				
3.	Nomor telepon seluler ya	ang	:				
	didaftarkan						
4.	E-mail		:				
B.	Data Satker						
1.				Kode Kew			
2.	Kode Unit Eselon I			Kode Jenis Dokumen			
3.	Nama satker			Kode Karwas			
4.	Kode satker			Tahun Ang	ggaran		
5.	Tanggal DIPA						
6.							
7.	Alamat satker						
						,	
	Kota			opinsi			
	Negara		K	ode pos		1	
8.	Nomor telepon satker						
Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja sebagai mana disebutkan di atas, memerintahkan kepada KPPN (sesuai KPPN mitra kerja Satker berkenaan) untuk melakukan penonaktifan atas PIN PPSPM yang merupakan tanggung jawab saya. Alasan penonaktifan PIN PPSPM dimaksud adalah:							
•••	(diisi oleh PPSPM)						
Surat permintaan penonaktifan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.							
5	Surat permintaan penonaktiian iiii dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mesanya.						
	Diterima di KPPN Tanggal: Customer Service KPPN		asu	engetahui: bbag Umum N		a Kota), (Tanggal, lan dan Tahun)	
(Nama lengkap & NIP) (Nama lengkap & NIP) (Nama lengkap & NIP/NRP)						engkap & NIP/NRP)	

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP19530814 197507 1 001

(KOP SURAT SATKER)

SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

A.	Data Prib	oadi				
1.	Nama Lei	ngkap (sesuai KTP)				
2.	NIP / NR	9	:		2	
B.	. Data Satker					
1.	Kode Bag	jian Anggaran		Kode Kew		
2.	Kode Unit Eselon I		Kode Jenis Dokumen			
3.	Nama sat	tker		Kode Karv	vas	
4.	Kode satk	ker			ggaran	
5.	Tanggal [DIPA	•			
6.					1	
7.	. Alamat satker					
	Kota		Pr	opinsi		
	Negara		Ko	de pos	•	
8.						

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja sebagaimana disebutkan di atas, memerintahkan kepada KPPN (sesuai KPPN mitra kerja Satker berkenaan) untuk melakukan penonaktifan atas PIN PPSPM dengan data sebagai berikut:

A. Data Pribadi			
Nama PPSPM (sesuai yang didaftarkan)	telah	:	
2. NIP / NRP		:	•
Nomor telepon seluler didaftarkan	yang	:	
B. Data Satker			
Kode Bagian Anggaran		1.	Kode Kewenangan
Kode Unit Eselon I			Kode Jenis Dokumen
Nama satker	2000		Kode Karwas
Kode satker			Tahun Anggaran
5. Tanggal DIPA			
Nomor DIPA			
7. Alamat satker			
Kota		Pro	opinsi
Negara		Ko	de pos
Nomor telepon satker			



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-19 /PB/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
ARSIP DATA KOMPUTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR.

Alasan penonaktifan PIN PPSPIN dimaksud a	idalan.
	(diisi oleh KPA)
Surat permintaan penonaktifan ini dibuat untu	ık dapat digunakan sebagaimana mestinya.
	(Nama Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) Kuasa Pengguna Anggaran,
	(Nama lengkap KPA & NIP/NRP)
Diterima di KPPN Tanggal: (ddmmyyyy) Customer Service KPPN	Mengetahui, Kepala Sub BagianUmum KPPN
(Nama Lengkap& NIP)	(Nama Lengkap& NIP)

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP19530814 197507 1 001